

**ANALISIS PRODUKTIVITAS SEKTORAL  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN  
KETIMPANGAN PENDAPATAN  
DI JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**JANWAR HARDI HALIM**  
**NIM. 12020110141013**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Janwar Hardi Halim

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141013

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **Analisis Produktivitas Sektoral Terhadap Tingkat  
Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di  
Jawa Tengah**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, M. Sc., Ph.D

Semarang, 22 Mei 2014

Dosen Pembimbing

(Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D)

NIP. 19581122 198403 1002

**PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Janwar Hardi Halim

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141013

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PRODUKTIVITAS SEKTORAL  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN  
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA  
TENGAH**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Mei 2014**

Tim Penguji

1. Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D. (.....)

2. Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP. (.....)

3. Darwanto, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

Anis Chariri. SE., Mcom., PhD., Akt  
NIP.196708091992031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Janwar Hardi Halim, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Produktivitas Sektoral Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila dikemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

Janwar Hardi Halim  
12020110141013

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Doa tanpa usaha adalah malas, Usaha tanpa doa adalah takabur.”*

(Yusuf Mansur)

*“Jadikanlah hari ini sebagai evaluasi untuk hari esok.”*

Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk Ibunda (Alm), Ayahanda, Paman, Bibi, dan Keluarga Tercinta

## **ABSTRACT**

*In the process of economic development in Indonesia, particularly Central Java, poverty and income inequality issues are complex and multidimensional. This study aimed to analyze the effect of growth economic, agricultural productivity, industrial productivity, and education on poverty and income equality in Central Java in 2008 to 2012.*

*The method used in this study are panel data with Fixed Effect Model Approach and Dummy areas. Dummy areas are used to catch poverty and income inequality variations in 35 regencies/ cities in Central Java in 2008 to 2012. Data collection methods used are secondary data.*

*The results of this study show that economic growth, industrial productivity, and education have significant effect at  $\alpha = 10$  percent against poverty. While, agricultural productivity have not significant effect against poverty in Central Java. This is because the agricultural sector in Central Java subsistence with low productivity levels. Furthermore, economic growth, ratio of productivity and ratio of education have significant effect at  $\alpha = 10$  percent against income inequality in Central Java. Based on the results of the correlation matrix, there is a weak negative correlation between poverty and income inequality in Central Java during the period 2008 to 2012.*

***Keywords: poverty, gini coefficient, economic growth, agricultural productivity, industrial productivity, education, ratio of productivity, ratio of education, dan panel data***

## ABSTRAK

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2008 – 2012.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan *dummy* wilayah. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008 – 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor industri, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada  $\alpha = 10$  persen. Sementara itu, variabel produktivitas sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian di Jawa Tengah masih subsisten dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, rasio produktivitas dan rasio pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada  $\alpha = 10$  persen. Berdasarkan hasil matriks korelasi, terdapat hubungan yang negatif dan lemah antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah selama periode 2008 hingga 2012.

**Kata kunci:** tingkat kemiskinan, gini indeks, pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri, pendidikan, rasio produktivitas, rasio pendidikan, dan panel data

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Produktivitas Sektoral Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan. Namun, berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibunda Lisetiani (alm), Ayahanda Ir. Tatang Hardi, paman dan bibi tercinta atas curahan kasih sayang, doa-doa, dan motivasi yang tak ternilai bagi penulis
2. Prof. Drs. H. Moh. Nasir, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memotivasi, memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di FEB UNDIP

5. Savira Maghfiratul Fadhilah atas doa dan motivasi yang selalu diberikan.  
Terima kasih sudah mau menemani selama ini
6. Tiko, Eko S. dan Andi Untung (fighter) yang selalu bersama dalam mengerjakan tugas dll
7. Keluarga IESP Reg. dua 2010 atas kebersamaannya selama ini
8. Kawan-kawan HMJ IESP UNDIP 2011-2012, SEMA FEB UNDIP 2012-2013 terima kasih untuk kerja samanya selama berorganisasi
9. Keluarga kost Ungu Tanjung Sari (Pak Gimin dan keluarga, Fery, Daru, Gery, Robi, Ary, Bobi, Wibi Cueng, Tito, Mudas, Ketut, Ciblek, Upin, Faza, dan Sari) atas semua perhatian dan kebersamaannya
10. Teman-teman KKN desa Somoketro Magelang atas kebersamaannya selama 35 hari

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 22 Mei 2014

Penulis

Janwar Hardi Halim

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Masalah Kemiskinan.....	1
1.1.2 Masalah Ketimpangan Pendapatan.....	8
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.1.1 Definisi dan Batasan Kemiskinan .....	15
2.1.1.2 Teori Penyebab Kemiskinan .....	20
2.1.2 Ketimpangan Pendapatan .....	23
2.1.2.1 Definisi Pendapatan .....	23
2.1.2.2 Definisi dan Pengukuran Ketimpangan Pendapatan .....	24
2.1.3 Teori Perubahan Struktural .....	28
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	31
2.1.4.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	31

2.1.4.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.....	37
2.1.4.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	40
2.1.5	Definisi dan Perhitungan Produktivitas .....	41
2.1.5.1	Pengaruh Produktivitas Terhadap Kemiskinan .....	44
2.1.5.2	Pengaruh Produktivitas Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	45
2.1.6	Teori Pendidikan.....	46
2.1.6.1	Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan .....	49
2.1.6.2	Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	49
2.2	Penelitian Terdahulu.....	50
	MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU .....	51
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	54
2.4	Hipotesis .....	56
	BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	58
3.1.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	58
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	60
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	61
3.4	Metode Analisis.....	61
3.4.1	Estimasi Model Dengan Panel Data .....	65
3.4.2	Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variable (LSDV)</i> .....	67
3.4.3	Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....	73
3.4.4	Pengujian Statistik .....	76
3.4.4.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	76
3.4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	77
3.4.4.3	Uji Signifikansi Individu (Uji t).....	77
3.4.5	Matriks Korelasi.....	78
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	80
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	80
4.1.1	Gambaran Umum .....	80
4.1.2	Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah.....	81
4.1.3	Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah.....	83
4.1.4	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	85

4.1.5	Produktivitas Sektor Pertanian dan Sektor Industri di Jawa Tengah 87	
4.1.6	Pendidikan.....	89
4.2	Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .....	91
4.2.1	Deteksi Multikolinearitas .....	91
4.2.2	Deteksi Autokorelasi .....	93
4.2.3	Deteksi Heteroskedastisitas.....	94
4.2.4	Deteksi Normalitas.....	96
4.3	Hasil Uji Statistik Analisis Regresi .....	98
4.3.1	Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	98
4.3.2	Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F).....	99
4.3.3	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	100
4.3.4	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> .....	102
4.3.5	Hubungan Korelasi Antara Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan .....	105
4.4	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	106
4.4.1	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan .....	106
4.4.2	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan. ....	111
4.4.3	Hubungan Korelasi Antara Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan .....	115
BAB V PENUTUP.....		116
5.1	Kesimpulan.....	116
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	117
5.3	Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....		119
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....		139

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produktivitas Sektoral di Jawa Tengah Tahun 1989-2012 .....	6
Tabel 1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .....	7
Tabel 1.3 Gini Indeks Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .....	8
Tabel 1.4 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 1983, 1993, dan 2000 di Jawa Tengah Tahun 1989-2012 .....	9
Tabel 4.1 Alokasi APBD Jawa Tengah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2008-2012 .....	81
Tabel 4.2 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.....	82
Tabel 4.3 Gini Indeks Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.....	84
Tabel 4.4 Laju PDRB Non Migas Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.....	86
Tabel 4.5 Rata-rata Produktivitas Sektor Pertanian (VT), Sektor Industri (VIN), dan Rasio (RV) Selama Tahun 2008-2012 Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.....	88
Tabel 4.6 Rata-Rata Jumlah Pekerja Lulusan SD+SMP, SMA Ke Atas, dan Rasio Pendidikan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.....	90
Tabel 4.7 R2 Hasil Auxiliary Regression Pengaruh PDRB, Prdktivitas Sektor Pertanian, Produktivitas Sektor Industri, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah .....	92
Tabel 4.8 R2 Hasil Auxiliary Regression Pengaruh PDRB, Rasio Produktivitas Sektor Industri Terhadap Pertanian, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah .....	93
Tabel 4.9 Hasil Uji Breusch-Godfrey (BG) Model Kemiskinan .....	93
Tabel 4.10 Hasil Uji Breusch-Godfrey (BG) Model Ketimpangan Pendapatan...	94
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) Model Kemiskinan.....	95
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) Model Ketimpangan Pendapatan .....	96
Tabel 4.13 Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/ Kota.....	103
Tabel 4.14 Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/ Kota.....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2012.....	2
Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012 .....	3
Gambar 1.3 Laju PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	5
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse .....	21
Gambar 2.2 Kurva Kemungkinan Produksi .....	26
Gambar 2.3 Kurva Lorenz dan Koefisien Gini .....	27
Gambar 2.4 Hipotesis Kuznets “U-Terbalik” .....	40
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	54
Gambar 4.1 Hasil Uji Jarque-Bera Model Kemiskinan .....	97
Gambar 4.2 Hasil Uji Jarque-Bera Model Ketimpangan Pendapatan.....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A TINGKAT KEMISKINAN, KETIMPANGAN PENDAPATAN, PDRB, PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN, PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN LANJUTAN, RASIO PRODUKTIVITAS, DAN RASIO PENDIDIKAN .....	140
LAMPIRAN B HASIL REGRESI UTAMA MODEL KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH.....	146
LAMPIRAN C HASIL UJI ASUMSI KLASIK MODEL KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH.....	149
LAMPIRAN D MATRIKS HUBUNGAN KORELASI ANTARA TINGKAT KEMISKINAN DENGAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH .....	164

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

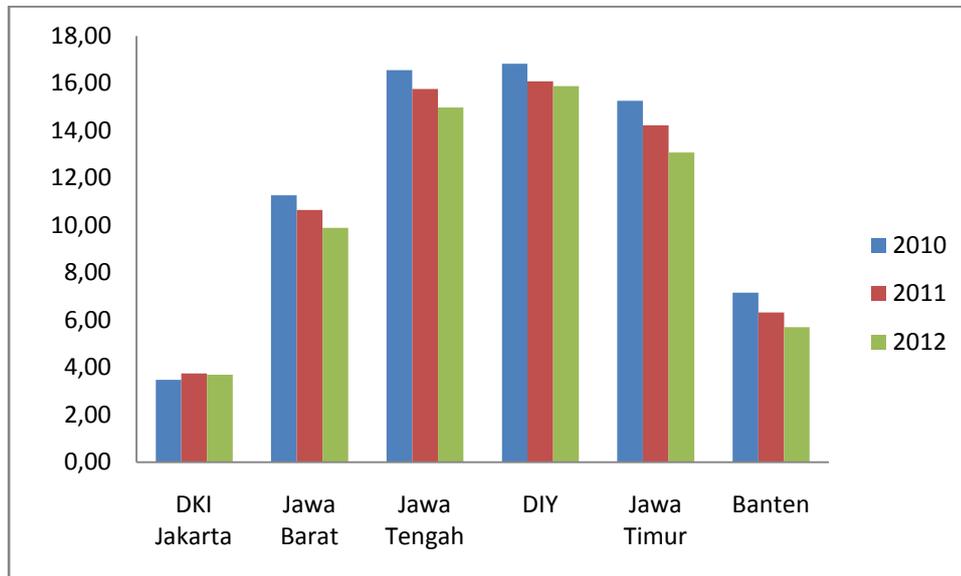
### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan kesempatan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Pada kenyataannya, proses pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami beberapa kendala, yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sejak awal pemerintahan orde baru, proses pembangunan yang dilakukan hanya terpusat di pulau Jawa khususnya pada sektor-sektor tertentu saja. Oleh sebab itu, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

#### **1.1.1 Masalah Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Menurut BPS, rata-rata persebaran penduduk miskin terbesar di Indonesia terdapat di pulau Jawa yaitu sebesar 525,73 ribu jiwa pada September tahun 2012. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dijadikan sebagai salah satu program prioritas, khususnya bagi pemerintah daerah di pulau Jawa termasuk provinsi Jawa Tengah. Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

**Gambar 1.1**  
**Persentase Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Di Pulau Jawa**  
**Periode 2010 – 2012 (Persen)**

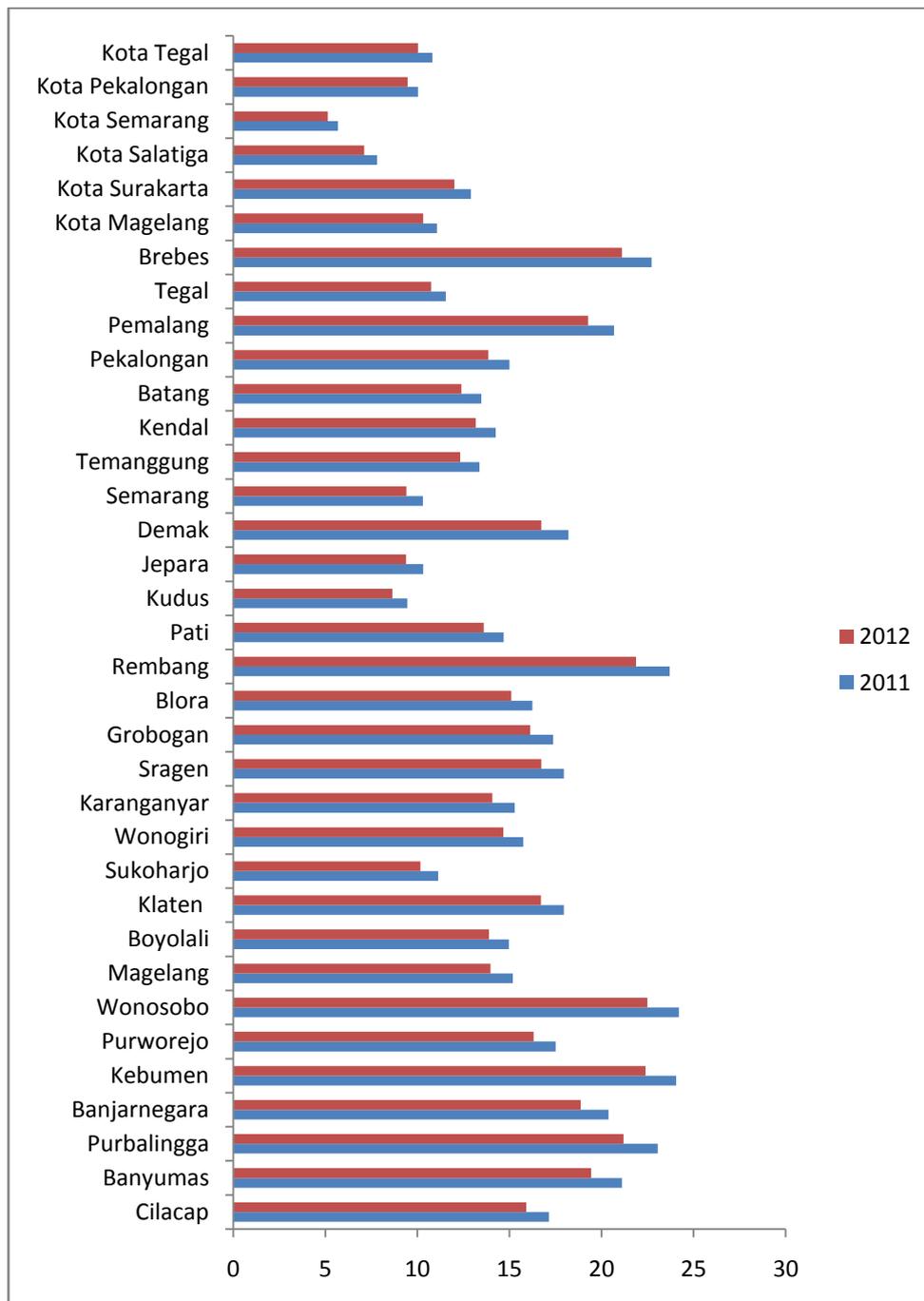


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah diolah*

Gambar 1.1 menggambarkan persentase jumlah penduduk miskin di pulau Jawa pada tahun 2010 hingga 2012. Persentase jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di provinsi DIY sebesar 16,83 persen pada tahun 2010 dan mengalami penurunan sebesar 15,88 persen pada tahun 2012. Persentase jumlah penduduk miskin terendah terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar 3,48 persen pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 3,70 persen.

Sementara itu, provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua setelah provinsi DIY, yaitu sebesar 16,56 persen pada tahun 2010 dan mengalami penurunan sebesar 14,98 persen pada tahun 2012. Selain itu, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah juga dapat dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan agregat dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

**Gambar 1.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah**  
**Periode 2011-2012 (Persen)**

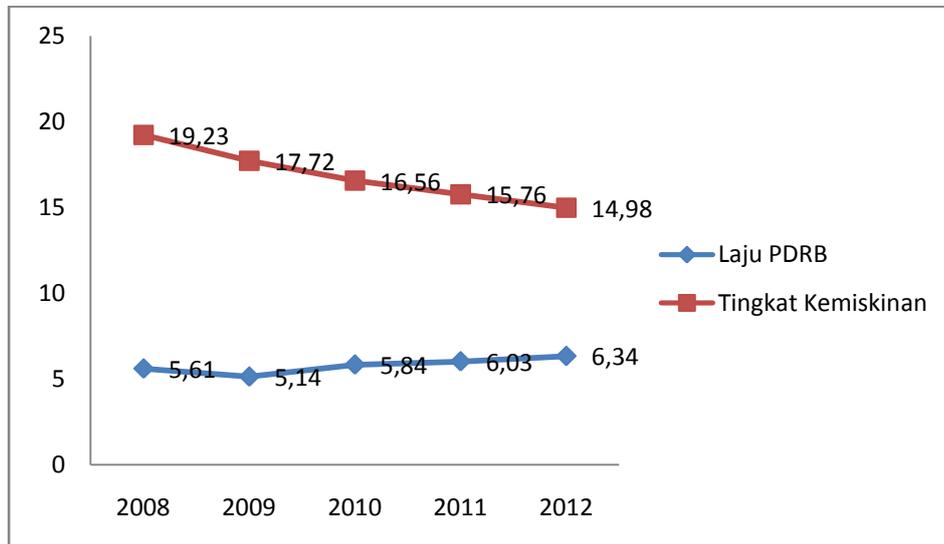


*Sumber: BPS Jawa Tengah diolah*

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah pada periode 2011 hingga 2012 masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2011 terdapat di daerah Wonosobo (24,21 persen), Kebumen (24,06 persen), Rembang (23,71 persen), dan Purbalingga (23,06 persen). Sedangkan Kabupaten/ Kota dengan persentase kemiskinan terendah di tahun yang sama yaitu Kota Semarang (5,68 persen), Kota Salatiga (7,8 persen), dan Kudus (9,45 persen). Pada tahun 2012, seluruh Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka persentase kemiskinannya. Persentase kemiskinan tertinggi pada tahun 2012 masih terdapat di daerah Wonosobo (22,5 persen), Kebumen (22,4 persen), dan Rembang (21,88 persen). Sedangkan Kabupaten/ Kota dengan persentase kemiskinan terendah di tahun yang sama yaitu Kota Semarang (5,13 persen) dan Kota Salatiga (7,11 persen). Selain itu, daerah yang paling berhasil dalam menurunkan persentase kemiskinan di provinsi Jawa Tengah adalah Purbalingga (1,87 persen), Rembang (1,83 persen), dan Wonosobo (1,71 persen).

Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya Jawa Tengah, strategi pengentasan kemiskinan yang paling efektif adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu menjangkau setiap golongan terutama golongan masyarakat miskin agar mereka dapat hidup sejahtera sehingga menjauhkan mereka dari lingkaran setan kemiskinan.

**Gambar 1.3**  
**Laju PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah**  
**Periode 2008-2012 (Persen)**



*Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah*

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama lima tahun terakhir selama periode 2008 hingga 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semula pada tahun 2008 sebesar 5,61 persen menjadi 6,34 persen pada tahun 2012. Peningkatan laju PDRB Jawa Tengah diikuti dengan kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin yang terjadi selama lima tahun terakhir selama periode 2008 hingga 2012. Angka kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, yaitu 19,23 persen pada tahun 2008 dan turun menjadi 14,98 persen pada tahun 2012. Kondisi ini menggambarkan asumsi bahwa terdapat hubungan negatif antara laju PDRB Jawa Tengah dengan tingkat persentase penduduk miskin di Jawa Tengah.

Sementara itu, kemiskinan individu muncul karena rendahnya modal atau sumber daya untuk melakukan produksi sehingga menyebabkan rendahnya

produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan individu menjadi miskin karena penghasilan yang diterima relatif rendah. Tabel 1.1 menunjukkan tingkat produktivitas sektoral di Jawa Tengah sejak tahun 1989 sampai 2012 yang terus mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1**  
**Produktivitas Sektoral di Jawa Tengah**  
**Periode 1989-2012 (Persen)**

Sektor	1989	1990	1999	2000	2010	2011	2012
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,51	0,51	1,30	1,38	6,22	6,57	7,25
Pertambangan, Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih	2,11	1,63	8,58	10,33	27,13	35,96	35,46
Industri Pengolahan	2,88	1,08	4,54	4,28	17,99	17,88	17,61
Konstruksi	1,18	1,25	2,44	2,85	10,52	10,71	10,42
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,87	0,97	3,09	3,18	11,82	12,69	13,55
Pengangkutan dan Komunikasi	1,49	1,31	3,21	3,19	14,77	18,90	20,96
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	11,76	11,03	19,77	12,48	39,14	28,35	29,02
Jasa	0,21	0,22	2,30	2,54	9,70	9,95	10,13

*Sumber: BPS Jawa tengah, diolah*

Sejak masa orde lama hingga tahun 2012, produktivitas sektor pertanian masih sangat rendah dibandingkan dengan produktivitas di sektor-sektor lainnya. Rendahnya produktivitas sektor pertanian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Jawa Tengah bekerja pada sektor pertanian. Hal ini terjadi karena kondisi sektor pertanian di Jawa Tengah yang masih relatif subsisten. Berbeda dari sektor pertanian, sektor industri memiliki produktivitas yang relatif tinggi. Produktivitas sektor industri mengalami peningkatan yang

sangat drastis dan signifikan pada tahun 1990-an hingga tahun 2012. Kondisi ini menyebabkan sektor industri menjadi sektor basis dalam perekonomian Jawa Tengah dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah hingga saat ini.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Teori pertumbuhan baru menekankan pada peranan penting pemerintah dalam peningkatan pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pengembangan penelitian untuk meningkatkan produktivitas manusia. Salah satunya, dapat dilakukan melalui investasi bidang pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keahlian dan pengetahuan juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Indikator tingkat pendidikan di Jawa Tengah dapat dilihat melalui jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

**Tabel 1.2**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi di Jawa Tengah Periode 2008-2012 (Jiwa)**

<b>Tahun</b>	<b>SD Kebawah</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA +</b>
2008	9.367.374	2.798.160	3.298.124
2009	9.457.640	2.893.843	3.483.899
2010	9.173.558	2.993.593	3.642.296
2011	9.135.874	3.048.208	3.732.053
2012	9.013.849	3.061.738	4.057.303

*Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, sebagian besar penduduk yang bekerja di Jawa Tengah hanya memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah selama periode 5 tahun terakhir. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja tamatan SD

mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 9.367.374 menjadi 9.013.849 pada tahun 2012. Pada level SLTP dan SLTA ke atas, jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 2.798.160 menjadi 3.061.738 di tahun 2012 untuk tingkat SLTP dan 3.298.124 pada tahun 2008 menjadi 4.057.303 di tahun 2012 untuk tingkat SLTA ke atas. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah Jawa Tengah dalam pembangunan modal manusia melalui bidang pendidikan memberikan hasil yang cukup baik.

### 1.1.2 Masalah Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan masih menjadi fenomena di Indonesia khususnya provinsi Jawa Tengah. BPS mendefinisikan Indeks Gini sebagai salah satu indikator dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Tabel 1.3 menggambarkan kondisi gini indeks provinsi Jawa Tengah yang cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2008 sampai 2012. Pada tahun 2010 sebesar 0,29 meningkat sebesar 0,33 pada tahun 2011 dan 0,34 pada tahun 2012.

**Tabel 1.3**  
**Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah**  
**Periode 2008-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Gini Indeks</b>
2008	0,30
2009	0,28
2010	0,29
2011	0,33
2012	0,34

*Sumber: BPS Jawa Tengah*

Faktor utama dalam masalah ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan pemerataan akan menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar. Tabel 1.4 menunjukkan kondisi PDRB Jawa Tengah selama tahun 1983 sampai 2012.

**Tabel 1.4**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 1983, 1993, dan 2000 di**  
**Jawa Tengah**  
**Tahun 1989-2012 (Miliar Rupiah)**

<b>Sektor</b>	<b>1989</b>	<b>1990</b>	<b>1999</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan	3.432,10	3.534,99	8.184,67	35.399,80	36.712,34
Pertambangan dan Penggalian	62,26	69,09	575,61	2193,96	2355,85
Industri Pengolahan	2.626,59	2.865,10	12.036,86	65.439,44	69.012,49
Listrik, gas dan Air Bersih	81,15	100,97	450,22	1.711,20	1.820,43
Konstruksi	498,16	542,83	1.626,24	11.753,38	12.573,96
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.990,22	2.232,05	9.026,90	43.159,13	46.719,02
Pengangkutan dan Komunikasi	464,79	498,09	1.946,93	10.645,26	11.486,12
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	244,10	285,35	1.559,30	7.503,72	8.206,25
Jasa-jasa	316,16	330,77	3.987,77	20.464,20	21.961,93

*Sumber: BPS Jawa Tengah*

Sebelum tahun 1990-an, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah (3.432,10 miliar rupiah). Namun, pasca tahun 1990-an sektor industri meningkat pesat (12.036,86 miliar rupiah) sehingga menggeser peranan sektor pertanian yang semula merupakan sektor basis dalam

perekonomian Jawa Tengah. Pada tahun 2012, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah (69.012,49 miliar rupiah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Jawa Tengah di dominasi oleh sektor pertanian dan industri.

Selain itu, tinggi rendahnya produktivitas antar sektor juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, UMKM dan industri padat karya. Oleh sebab itu, sektor pertanian dan industri menjadi fokus pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Besar kecilnya rasio produktivitas pada sektor industri dan pertanian akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan, semakin besar rasio produktivitas antara sektor industri dan pertanian akan berdampak pada distribusi pendapatan yang semakin timpang. Sebaliknya, rasio produktivitas yang semakin kecil akan berdampak pada distribusi pendapatan yang semakin merata.

Faktor lain yang juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah rasio pendidikan. Mayoritas pekerja di Jawa Tengah hanya lulusan SMP ke bawah dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan SMA ke atas. Besar kecilnya rasio pendidikan antara pekerja lulusan SMP ke bawah dan pekerja lulusan SMA ke atas akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan, semakin besar rasio pendidikan antara pekerja lulusan SMP ke bawah dan pekerja lulusan SMA ke atas akan berdampak pada dsitribusi pendapatan yang semakin timpang. Sebaliknya, rasio pendidikan yang semakin kecil akan berdampak pada distribusi pendapatan yang semakin merata.

## 1.2 Perumusan Masalah

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 19,23 persen pada tahun 2008 menjadi 14,98 persen pada tahun 2012. Rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan karena masih belum meratanya program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan ke seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi, tinggi rendahnya produktivitas sektor industri dan pertanian, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan pekerja yang ada di Jawa Tengah.

Selain itu, peningkatan yang terjadi pada gini indeks di Jawa Tengah pada tahun 2008 hingga 2012 merupakan masalah ketimpangan pendapatan yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi, besar kecilnya rasio produktivitas antara sektor industri dan sektor pertanian, dan rasio pendidikan pekerja.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PDRB, produktivitas sektor industri, produktivitas sektor pertanian, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012?
2. Apakah PDRB, rasio produktivitas sektor industri terhadap sektor pertanian, dan rasio pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012?

3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB, produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri dan rasio pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012
2. Menganalisis pengaruh PDRB dan rasio produktivitas sektor industri dan pertanian terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012
3. Menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sehingga dapat diidentifikasi faktor-

faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

## 2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dan ketimpangan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari fenomena tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menyajikan landasan teori tentang kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan, teori produktivitas sektoral, hubungan antara produktivitas sektoral terhadap kemiskinan dan ketimpangan, teori pendidikan, hubungan antara pendidikan dengan kemiskinan dan ketimpangan. Disamping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis yang dapat diambil.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, yaitu kondisi kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, produktivitas dan pendidikan di Jawa Tengah, analisis data dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Definisi dan Batasan Kemiskinan**

Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan suatu individu. Oleh karena itu, seseorang dikatakan dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokoknya. Banyak pihak yang mendefinisikan kemiskinan secara lebih rinci, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kemauan individu, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya.
- b. Definisi kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) merupakan suatu kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari. BPS menyatakan ada 14 kriteria suatu keluarga/ rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu:
  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester

4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari air sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan  $500 \text{ m}^2$  – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan (2005), atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan (2007)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya

- c. *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana tidak terpenuhinya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 2,00 per hari.
- d. Mudrajad Kuncoro (2006) menjelaskan kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, kemiskinan absolut dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Berdasarkan dari pengertian kemiskinan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan hidup yang disebabkan karena minimya pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. BPS mengemukakan bahwa garis kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengindikasikan kemiskinan yang didasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum seperti konsumsi makanan, pakaian dan perumahan.

Todaro (2006) mengemukakan bahwa cakupan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu US\$ 1 perhari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Salah satu strategi praktis untuk menentukan garis kemiskinan lokal adalah dengan menetapkan sekelompok makanan yang cukup, yang didasarkan atas persyaratan nutrisi dari penelitian medis tentang kalori, protein, dan mikronutrien yang dibutuhkan tubuh. Kemudian, dengan menggunakan data

survei rumah tangga lokal, diidentifikasi sekelompok makanan yang biasa dibeli oleh rumah tangga yang hampir tidak memenuhi persyaratan nutrisi ini. Kemudian ditambahkan pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan dasar lain, seperti pakaian, tempat tinggal, dan sarana kesehatan, untuk menentukan garis kemiskinan lokal. Tergantung pada bagaimana kalkulasi ini dilakukan, garis kemiskinan yang dihasilkan mungkin melebihi \$ 1 perhari pada paritas daya beli (PPP).

Cara mengukur jumlah kemiskinan yang paling sederhana menurut BPS adalah: Pertama, dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu kemiskinan dikonsepsikan sebagai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, dengan menggunakan *Headcount Indeks* yaitu dengan cara menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, namun indikator ini mengabaikan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, digunakan *poverty gap* untuk mengatasi kelemahan tersebut. *Poverty Gap* ini menghitung transfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat di atas garis kemiskinan, sehingga kemiskinan dapat hilang.

Sujogyo (dalam Franciari 2012) menjelaskan garis kemiskinan berdasarkan harga beras, yaitu tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan harga beras. Garis kemiskinan menurutnya yaitu nilai rupiah yang setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Akan tetapi pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil. Garis kemiskinan Sujogyo lebih rendah

dibandingkan garis kemiskinan BPS, sehingga jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan lebih rendah setiap tahunnya. Ukuran Sujogyo tidak menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang mulus seperti versi BPS, tetapi menunjukkan penurunan substansial baik kemiskinan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Ukuran kemiskinan Sujogyo memiliki dua kelemahan. Pertama, Sujogyo hanya mengandalkan satu harga yaitu harga beras. Kedua, beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, tetapi porsinya dalam anggaran keluarga turun bahkan di keluarga miskin porsinya turun dengan cepat.

Ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecke (dalam Todaro, 2006):

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z + y_i}{z} \right]^\alpha \quad (2.1)$$

Dimana:

$\alpha = 0, 1, 2$

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$ .

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika:

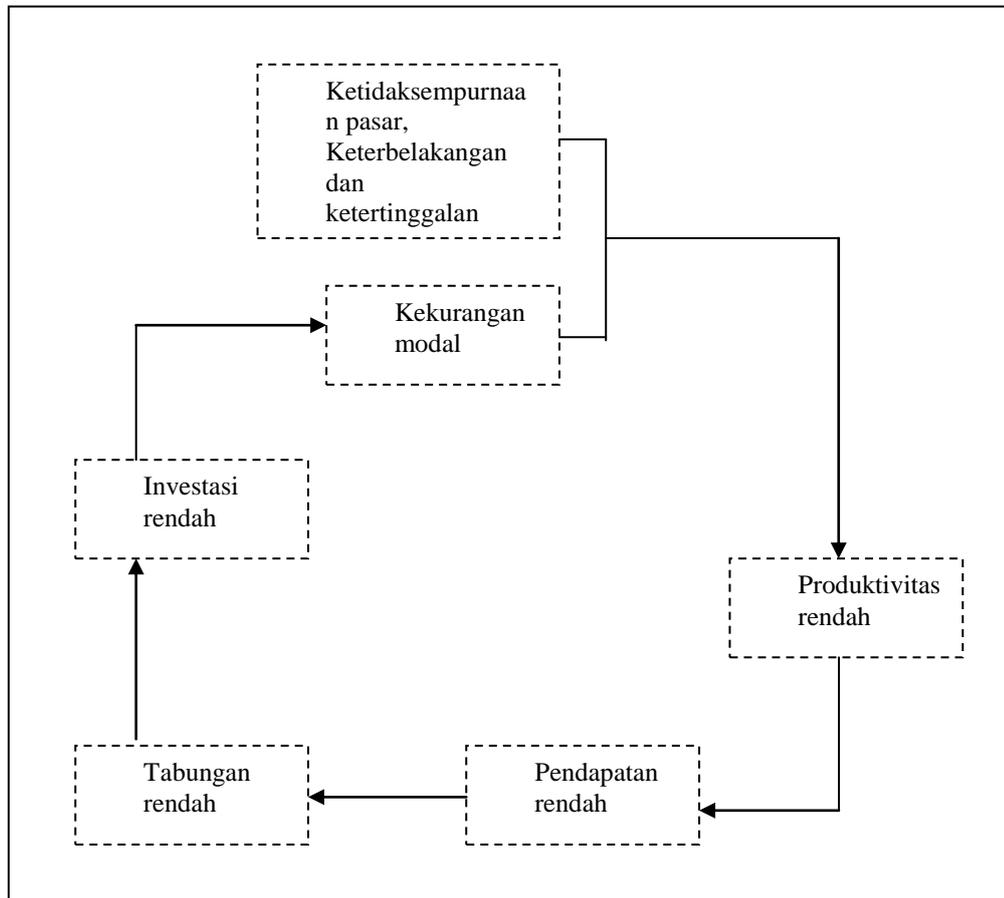
- $\alpha = 0$ , maka diperoleh *Head Account Indeks* ( $P_0$ ), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

- $\alpha = 1$ , maka diperoleh *Poverty Gap Indeks* ( $P_1$ ), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan
- $\alpha = 2$ , maka diperoleh *Poverty Severity* ( $P_2$ ), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin

#### **2.1.1.2 Teori Penyebab Kemiskinan**

Sharp, dkk (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

**Gambar 2.1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse**



*Sumber: Mudrajad Kuncoro 2006*

Nurkse (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Menurut *World Bank* (1993) dalam *Policy Research Working Paper: Poverty and Policy* menjelaskan sebab-sebab kemiskinan struktural dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya demokrasi: hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka
2. Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk
3. Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi
4. Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik
5. Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui privatisasi program-program sosial
6. Eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin
7. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan terjadinya monopoli ekonomi dan polarisasi masyarakat yang memacu bertambahnya pemupukan pendapatan dan kesejahteraan

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai skill yang selanjutnya membuat

produktivitasnya meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun, apabila pemerintah tidak pro-kemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang. Di beberapa negara, pemerintah membuat kebijakan tanpa peduli dengan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri mereka sendiri.

Sumarto dan Suryahadi (dalam Suwardi 2011) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Akibatnya seseorang yang bekerja di sektor pertanian memiliki potensi atau probabilitas menjadi miskin lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak bekerja di sektor pertanian. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian merupakan faktor terkuat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

## **2.1.2 Ketimpangan Pendapatan**

### **2.1.2.1 Definisi Pendapatan**

Menurut Hicks (dalam Damarjati 2010) pendapatan adalah jumlah yang dapat dibelanjakan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, sementara nilai kekayaannya tetap utuh. Salah satu alternatif dalam mengukur pendapatan adalah melalui pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan faktor yang relevan dalam penilaian kesejahteraan.

Raharja dan Manurung (2008) membagi sumber penerimaan rumah tangga sebagai pendapatan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pendapatan dari gaji dan upah yang merupakan balas jasa sebagai tenaga kerja. Besar gaji atau upah dipengaruhi produktivitas, diantaranya tingkat keahlian (*skill*), kualitas modal manusia (*human capital*), dan kondisi kerja (*working condition*)
- b. Pendapatan dari aset produktif, berupa pemasukan balas jasa penggunaan, diantaranya aset finansial (deposito, modal, dan saham), dan bukan aset finansial (rumah, tanah, dan bangunan)
- c. Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*), berupa pendapatan yang diterima sebagai balas jasa atas input yang diberikan, misalnya dalam bentuk subsidi, tunjangan atau jaminan sosial

#### **2.1.2.2 Definisi dan Pengukuran Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Glaeser (dalam Hajiji, 2010) ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights*. Menurut Mubiyarto (1995), kesenjangan dapat dibedakan menjadi:

1. Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kesenjangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para pakar di banyak negara

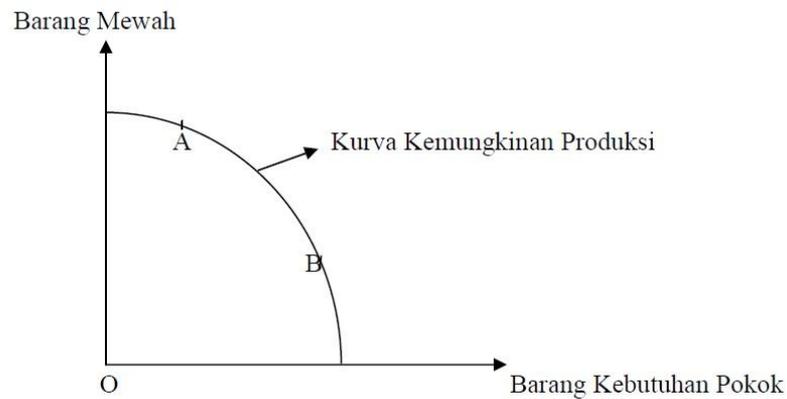
2. Kesenjangan antar daerah. Dalam sejarah, kesenjangan antar daerah terjadi antar wilayah Jawa dan Luar Jawa, dan sejak kemajuan Provinsi Bali yang luar biasa, menjadi kesenjangan “Jawa dengan Luar Jawa Bali”
3. Kesenjangan antar golongan ekonomi. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat justru mengakibatkan kesenjangan menjadi semakin parah

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap kurang adil

Lincoln Arsyad (2004) mengemukakan cara sederhana untuk mengetahui masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Dalam hal ini, suatu perekonomian diasumsikan menjadi dua macam barang, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Produksi dianggap terjadi di sepanjang kurva kemungkinan produksi. Gambar 2.2 menjelaskan proses yang terjadi pada kurva kemungkinan produksi pada barang kebutuhan pokok dan barang mewah.

**Gambar 2.2**  
**Kurva Kemungkinan Produksi**



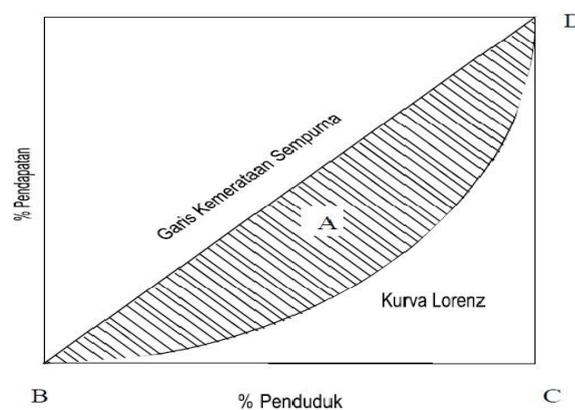
*Sumber: Lincoln Arsyad, 2004*

Kurva tersebut menggambarkan kombinasi dari dua macam barang (pokok dan mewah) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Misalkan titik A dan B menghasilkan pendapatan nasional yang sama. Titik A lebih banyak menghasilkan barang mewah dibandingkan barang pokok. Sedangkan titik B lebih banyak menghasilkan barang pokok daripada barang mewah. Pada negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, semakin timpang distribusi pendapatan, maka permintaan agregat akan lebih dipengaruhi oleh konsumsi orang-orang kaya. Posisi produksi barang konsumsi berada di titik A, dimana biasanya orang-orang kaya lebih banyak mengkonsumsi barang-barang mewah dibandingkan barang kebutuhan pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentu akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita.

Menurut BPS indikator yang sering digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan

yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Ketimpangan distribusi pendapatan dikategorikan: (a) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (b) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan; (c) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro, 2006).

**Gambar 2.3**  
**Kurva Lorenz dan Koefisien Gini**



*Sumber: Todaro 2006*

Selanjutnya, Todaro (2006) juga menjelaskan metode lain untuk menganalisis ketimpangan pendapatan adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang mereka terima selama 1 tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan

sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Indeks Gini seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase populasi. Indeks Gini dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$G = \sum_{t=1}^{n-1} \mu_{t+1} \pi_t - \sum_{t=1}^{n-1} \mu_t \pi_{t+1} \quad (2.2)$$

Dimana:

G = gini rasio

$\mu_t$  = persentase pendapatan

$\pi_t$  = persentase populasi

### 2.1.3 Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Model perubahan struktural tersebut dalam analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa teori harga dan alokasi sumberdaya, serta metode-metode ekonometri modern untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi. Aliran perubahan struktural ini didukung oleh ekonom-ekonom yang sangat terkemuka seperti Lewis dan Chenery (Todaro, 2006).

Arthur Lewis (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006) dengan teorinya yang terkenal adalah dualisme sektoral, mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. sektor tradisional yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada hukum *law of deminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel, justru menurunkan total produksi yang ada. Di sisi lain, pengurangan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor pertanian tidak akan mengurangi tingkat produksi yang ada akibat proporsi input variabel tenaga kerja yang terlalu besar (surplus tenaga kerja). Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerja terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal, dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri
- b. sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten melalui proses urbanisasi. Kondisi ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal terutama dari tenaga kerja, bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian perkotaan akan menjadi daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan karena nilai produk marginal dari tenaga kerja positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Lewis juga mengasumsikan bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat

upah di pedesaan, yang relatif subsisten dan tingkat upah cenderung tetap sehingga bentuk kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal.

Perhatian utama dari model Lewis diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tersebut mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan oleh sektor modern yang ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal di sektor modern itu sendiri. Peningkatan investasi itu sendiri menimbulkan adanya kelebihan keuntungan di sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modalnya ke sektor modern.

Selanjutnya, model perubahan struktural yang paling terkenal adalah teori pola pembangunan yang disusun berdasarkan penelitian empiris oleh Hollis B. Chenery. Dalam penelitiannya pada tahun 1970-an, Chenery (dalam Achma Hendra, 2011) berhasil menunjukkan ciri-ciri perubahan struktural perekonomian di negara-negara berkembang dalam proses pembangunan ekonomi. Corak dari perubahan struktur perekonomian tersebut dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi, meliputi pembentukan modal; pendapatan pemerintah; dan pendidikan
2. Perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam alokasi sumberdaya, meliputi struktur permintaan domestik; struktur produksi; dan struktur perdagangan

3. Perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses demografis dan distribusi, meliputi alokasi tenaga kerja; urbanisasi; transisi demografis; dan distribusi pendapatan

## **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.1.4.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2006). Selanjutnya Todaro menjelaskan ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

## 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

## 3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi bias dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Teori pertumbuhan lain yang terkenal adalah teori Walt Whitman Rostow yang merupakan garda depan dari *linear stage of growth theory*. Rostow (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap, yaitu (1) tahap perekonomian tradisional; (2) tahap prakondisi

tinggal landas; (3) tahap tinggal landas; (4) tahap menuju kedewasaan; (5) tahap konsumsi massa tinggi.

Sementara itu, Harrod-Domar menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan ( $s$ ) dan rasio modal-output nasional ( $k$ ). Selanjutnya, teori pertumbuhan neo-klasik dari Solow menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada teori pertumbuhan baru menurut Romer, teknologi bersifat endogen dan melekat pada faktor tenaga kerja tersebut. Romer menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan berdasarkan tingkat teknologi yang dimiliki oleh tenaga kerja. (Todaro, 2006).

Menurut Boediono (2008) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Menurut Nugraheni (dalam Prastyo, 2010), pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain adalah:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global

sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Bruto per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau daerah daripada nilai PDB atau PDRB saja. PDB atau PDRB per kapita adalah jumlah PDB atau PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d)

perubahan stok, dan (e) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan berbeda dengan pembangunan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang mencakup berbagai aspek kehidupan secara berkesinambungan yang hasilnya harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses dari pemikiran yang dilandasi keinginan untuk mencapai kemajuan bangsa (Hajji, 2010).

Menurut Meier (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi

pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi. Suatu proses pembangunan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan nilai inti pembangunan adalah kecukupan (*sustainability*), harga diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Kecukupan (*sustainability*) adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Harga diri (*self esteem*) untuk menjadi manusia seutuhnya, merupakan dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan sesuatu. Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghamba berupa kemampuan untuk memilih. Nilai yang terkandung dalam konsep ini adalah konsep kemerdekaan manusia, yang diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak mudah diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam kehidupan ini. Lebih lanjut Todaro menjelaskan proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok
2. Peningkatan standar hidup
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial

Disamping memiliki tujuan inti, pembangunan secara garis besar memiliki indikator-indikator kunci yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Yang termasuk sebagai indikator ekonomi adalah GNP per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita

dengan *Purchasing Power Parity*, sedangkan yang termasuk indikator sosial adalah *Human Development Index (HDI)* dan *Physical Quality Life Index (PQLI)* atau indeks mutu hidup (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Sadono Sukirno (2004) menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$g_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Dimana:

$g_t$  = tingkat pertumbuhan pendapatan yang dinyatakan dalam persen

$Y_t$  adalah pendapatan pada tahun t

$Y_{t-1}$  adalah pendapatan pada tahun t-1

#### **2.1.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan asumsi bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar secara merata disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Dwi Wahyuniarti, 2008). Banyak penelitian lain yang

membuktikan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain:

1. Wongdesmiwati (dalam Wahyudi 2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang akan ada. Semakin impresif pertumbuhan ekonomi, akan berdampak pada mereduksinya tingkat kemiskinan yang ada.
2. Warr (2006) meneliti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Menurut Warr, pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi atau dengan redistribusi pendapatan. Kebijakan ekonomi dapat dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi ataupun meredistribusikan pendapatan, atau kedua-duanya, untuk mengentaskan kemiskinan.

Pernyataan-pernyataan diatas sejalan dengan teori "*trickle down effect*" yang menyebutkan adanya aliran yang menetes ke bawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang meningkat berarti penduduk miskin akan berkurang. Jadi, cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi baik untuk pengentasan kemiskinan (Hajiji, 2010).

Gary Fields (dalam Todaro, 2006) menganalisis tiga kasus terbatas dalam pembangunan dualistik dan membedakannya menjadi tiga tipologi pembangunan, yaitu: (1) tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern (*modern-sector enlargement*), dimana usaha pengembangan ekonomi dua-sektor (sektor industri

modern dan sektor pertanian tradisional) bertumpu pada pembinaan dan pemekaran ukuran sektor modern dengan mempertahankan tingkat upah di kedua sektor; (2) tipologi pertumbuhan pengayaan (*enrichment*) sektor modern dimana perekonomian tumbuh, tetapi hanya segelintir orang di sektor industri modern yang menikmati buah pertumbuhan itu, sementara jumlah pekerja maupun tingkat upah di sektor tradisional tetap; (3) tipologi pengayaan pertumbuhan (*enrichment*) sektor tradisional dimana hampir semua manfaat pertumbuhan tercurah secara merata ke seluruh pekerja di sektor tradisional dan tidak dinikmati oleh sektor industri.

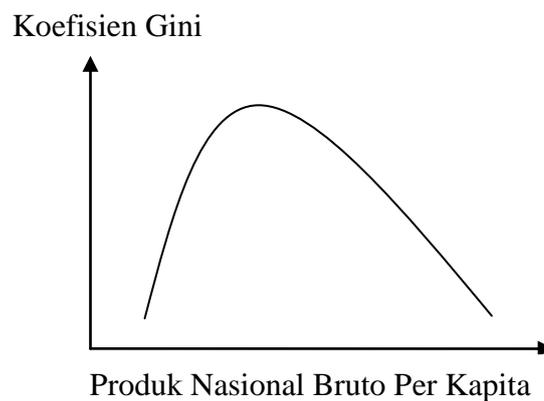
Berdasarkan ketiga tipologi pertumbuhan diatas, Fields menunjukkan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Pada tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional, ternyata pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan yang relatif lebih merata, dan mengurangi kemiskinan.
2. Pada tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dsitribusi pendapatan yang relatif semakin timpang, dan kondisi kemiskinan tidak mengalami perbaikan sedikit pun
3. Menurut konsepsi pertumbuhan perluasan sektor modern seperti dalam teori Lewis, pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut menurun.

### 2.1.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Simon Kuznet dalam Todaro (2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

**Gambar 2.4**  
**Hipotesis Kuznets “U-Terbalik”**



*Sumber: Todaro (2006)*

Kuznets menitikberatkan pada perubahan struktural yang terjadi pada pembangunan ekonomi. Ketika peranan sektor industri semakin meningkat, maka terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri modern termasuk industri pengolahan dan jasa. Dalam transisi ekonomi ini, produktivitas tenaga kerja pada sektor modern lebih tinggi daripada produktivitas sektor pertanian sehingga pendapatan per kapita pada sektor modern juga akan lebih tinggi.

Hasilnya, ketimpangan antara kedua sektor itu semakin meningkat pada tahap awal pembangunan dan kemudian menurun pada tahap selanjutnya.

Sejak dekade 1980-an, muncul kritikan tentang hipotesis Kuznets. Dollar dan Kraay (dalam hajiji, 2010) menyatakan bahwa secara rata-rata, pendapatan kelompok termiskin dalam masyarakat akan meningkat secara proporsional dengan peningkatan pendapatan rata-rata. Esterly (1999) juga menyatakan bahwa perubahan pendapatan dan perubahan ketimpangan tidak berkorelasi. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan berbeda-beda tergantung pada data dan metodologi yang digunakan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah (Mudrajad Kuncoro, 2004).

### **2.1.5 Definisi dan Perhitungan Produktivitas**

Sukamto (1995) mengatakan bahwa produktivitas adalah nilai output dalam hubungan dengan suatu kesatuan input tertentu. Peningkatan produktivitas yang berarti jumlah sumber daya yang digunakan dengan jumlah barang jasa yang diproduksi semakin meningkat dan membaik. Sedangkan menurut Moekijat (dalam Wahyuni, 2009) produktivitas adalah perbandingan jumlah keluaran

(output) tertentu dengan jumlah masukan (input) tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Produktivitas menurut Sudomo dalam Tambunan (2012), mempunyai berbagai pengertian sebagai berikut:

1. Produktivitas adalah rasio dari apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan faktor produksi yang digunakan (input)
2. Dewan Produktivitas Nasional Indonesia merumuskan produktivitas sebagai berikut: Produktivitas pada dasarnya adalah sesuatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
3. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan barang modal, teknologi, manajemen, informasi, energi dan sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat melalui konsep produktivitas semesta/ total.
4. Produktivitas adalah kekuatan pendorong (*driving force*) untuk mewujudkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang pada hakekatnya adalah sasaran pembangunan nasional. Dengan kata lain produktivitas mendorong pertumbuhan dan pertumbuhan adalah kemajuan. Untuk suatu negara ukurannya adalah Gross Domestic Bruto (GDB) sedangkan untuk perorangan diukur dengan jam kerja (*input per man hour*).

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah produktivitas dipandang dari 2 segi yaitu:

- a. Secara filosofis adalah suatu pandangan bahwa kualitas kerja hari ini harus lebih baik dari kualitas kerja kemarin dan kualitas kerja hari esok harus lebih baik dari hari ini pada umumnya.
- b. Secara teknis merupakan rasio antara keluaran (output) dan masukan (input), atau dengan formula:

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \quad (2.4)$$

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2008), laju kenaikan produktivitas dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi.

Untuk melihat produktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep fungsi produksi yang merupakan konsep sistematis yang menghubungkan output dengan berbagai kombinasi input faktor produksi (sementara tingkat kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor yang konstan) untuk menjelaskan cara penduduk menyediakan kebutuhannya (Todaro, 2006). Jumlah output/ produk barang dan jasa dalam perekonomian di suatu wilayah telah diuraikan dengan menghitung besarnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Selanjutnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang berperan dalam proses produksi, merupakan populasi orang yang bekerja dalam angkatan kerja pada periode tertentu. Menurut Ramayani (2012), tinggi atau rendahnya

produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, investasi pemerintah dan investasi swasta.

#### **2.1.5.1 Pengaruh Produktivitas Terhadap Kemiskinan**

Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan (Sharp dalam Kuncoro, 2006).

Sementara itu, Nurkse pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menyatakan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan. Oleh sebab itu, usaha memerangi kemiskinan lebih diarahkan kepada pemotongan lingkaran setan kemiskinan tersebut (Kuncoro, 2006).

Banyak penelitian lain yang membuktikan keterkaitan antara produktivitas dengan kemiskinan. Fan (2004) dalam penelitiannya di Thailand menemukan bahwa penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian memiliki dampak paling besar dibandingkan produktivitas petani di sektor pertanian dan polulasi

penduduk. Sementara itu, produktivitas petani paling besar dipengaruhi oleh lamanya sekolah dan diikuti oleh penelitian dan pengembangan pertanian.

#### **2.1.5.2 Pengaruh Produktivitas Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Lewis menyatakan bahwa dualisme sektoral yang terjadi dalam perekonomian, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Pada sektor tradisional Lewis mengasumsikan bahwa terjadi surplus tenaga kerja (elastisitas sempurna) yang menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor tradisional relatif rendah karena cenderung subsisten. Sementara itu, pada sektor modern diasumsikan bahwa tenaga kerja yang terbatas dan memiliki produktivitas tinggi sehingga meningkatkan akumulasi kapital yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan ketimpangan antar sektor tradisional dan modern karena investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor modern (Kuncoro, 2006).

Selanjutnya, Fields dalam Todaro (2006) pada hasil penelitiannya berhasil menunjukkan keabsahan pada pernyataan-pernyataan berikut:

1. Pada tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah, ternyata pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata.
2. Pada tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern yang memiliki produktivitas tinggi, pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan dsitribusi pendapatan yang relatif semakin timpang.

### 2.1.6 Teori Pendidikan

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur pendidikan terdiri dari:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. jenjang pendidikan formal:
  - a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

- b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
  3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi moderen dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian. (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Dian Satria, 2008). Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*). Romer, 1986; Lucas, 1988 (Prastyo, 2010), menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.

### **2.1.6.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan**

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya (Todaro, 2006).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

### **2.1.6.2 Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Todaro (2006) menyatakan bahwa adanya efek buruk pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan di negara berkembang adalah karena pendapatan pekerja yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat lanjutan dan universitas akan mempunyai perbedaan pendapatan sampai 300 – 800 persen dengan tenaga kerja yang hanya menyelesaikan sebagian atau seluruh pendidikan tingkat sekolah

dasar. Pada intinya, apabila golongan miskin tidak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan tinggi karena alasan-alasan keuangan atau lainnya, maka sistem pendidikan justru akan memperburuk ketidakmerataan di negara-negara berkembang.

Gemmel (dalam Damarjati, 2010) mengungkapkan bahwa kebanyakan negara berkembang memiliki masalah kebebasan memilih yang lebih terbatas dibandingkan negara maju, sehingga hanya sedikit orang yang memperoleh pendidikan sesuai yang diinginkan. Kesempatan yang tidak merata dalam memperoleh informasi, sulitnya meminjam uang untuk biaya pendidikan mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak merata. Dampak yang timbul dari masalah ini adalah jumlah kelompok rumah tangga yang berpendapatan menengah ke atas cenderung bertambah dari kalangan mereka sendiri dan bukan berasal dari kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penyertaan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini dapat dilihat berdasarkan matriks penelitian terdahulu berikut.

### MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Jurnal/ Judul Penelitian	Dependen/ independen variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
1	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Studi Kasus 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (Skripsi Adit Agus Prastyo, 2010)	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, upah minimum Variabel dependen: tingkat kemiskinan di Jawa Tengah	Metode analisis regresi Data Panel dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	Berdasarkan hasil analisis pengolahan data, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan $R^2$ yang cukup tinggi yaitu 0,982677.
2	Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Skripsi Purwiyanti Septiana Franciari: 2012)	Variabel dependen: tingkat kemiskinan Variabel independen: IPM, kapasitas fiskal, korupsi	Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS dan Uji Kausalitas Granger	Pada tahun 2008 variabel independen berpengaruh negatif secara tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ dan $10\%$ , pada tahun 2010 hanya variabel kapasitas fiskal yang signifikan. Berdasarkan uji kausalitas Granger terdapat pola perbedaan perilaku pada tahun 2008 dan 2010
3	Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia (Akbar Suwardi: jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia vol. 12 Juli 2011)	Variabel dependen: kemiskinan, produktivitas pertanian Variabel independen: irigasi, infrastruktur, jalan, <i>literacy</i> , pendidikan, upah, produksi,	Menggunakan analisis regresi data panel dan panel-simultan	Berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur dan pendidikan signifikan mempengaruhi produktivitas

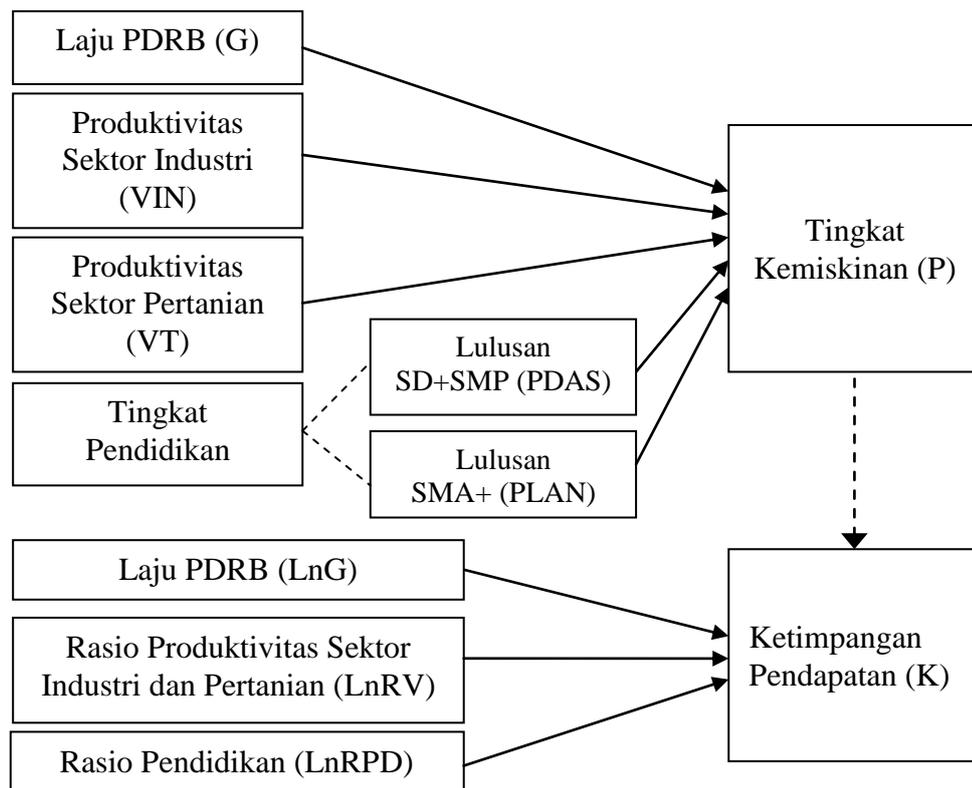
		polulasi, lahan, petani, non petani, produktivitas pertanian		pertanian dan kemiskinan. Efek pengeluaran pemerintah daerah paling besar ditunjukkan oleh panjang jalan, tingkat melek huruf dan irigasi
4	Fan, <i>et. All</i> (2004) "The Importance of Public Investment for Reducing Rural Poverty in Middle-Income Countries: The Case of Thailand. DSGD Discussion Paper, 7. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.	Variabel dependen: Kemiskinan Pedesaan Variabel independen: Jumlah Penduduk, produktivitas pertanian, petani, non petani, konsumsi listrik, dan panjang jalan	Analisis regresi data panel dan Persamaan Simultan	Penduduk non petani memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan produktivitas petani dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Thailand. Produktivitas petani dipengaruhi oleh lamanya sekolah dan konsumsi listrik di masyarakat
5	Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008 (Tesis Ajid Hajiji: 2010)	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan Variabel dependen: tingkat kemiskinan.	Analisis statistika deskriptif dan Analisis Regresi data Panel pendekatan <i>Fixed Effect</i>	Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan di provinsi Riau dan merupakan faktor penentu dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Riau
6	Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Citra Ramayani: jurnal kajian ekonomi, vol. 1 April 2012)	Variabel independen: pendidikan, kesehatan, investasi, inflasi dan ekspor Variabel dependen: pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja	Analisis deskriptif dengan studi literatur dan analisis regresi berganda	Pendidikan, kesehatan, dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Di sisi lain, investasi swasta, inflasi,

				ekspor dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
7	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Jawa Tengah (Skripsi Annisa Ganis Damarjati: 2010)	Variabel dependen: kesenjangan pendapatan Variabel independen: tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar, dan aglomerasi	Analisis regresi data panel dengan pendekatan PLS	Seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah dan berlakunya hipotesis Kuznetz.
8	Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi di Indonesia (Skripsi Krismanti Tri Wahyuni: 2009)	Variabel independen: infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Variabel dependen: produktivitas ekonomi	Analisis regresi data panel pendekatan <i>Fixed Effect</i>	Infrastruktur memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas ekonomi dengan tingkat elastisitas yang berbeda-beda, yaitu infrastruktur sarana kesehatan sebesar 0,65, energi listrik 0,08, panjang jalan 0,07 dan air bersih 0,05.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah yang masih cukup tinggi. Menurut penulis, faktor-faktor yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan pendidikan. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka pemikiran yang sistematis:

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Keterangan:

- : faktor penyebab
- : hubungan korelasi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa pada model kemiskinan pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan syarat utama bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar ke golongan masyarakat miskin. Semakin banyak golongan miskin yang memperoleh hasil dari pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari lingkaran kemiskinan (Wahyuniarti, 2008). Selain itu, sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Sumarto dalam Suwardi, 2011). Sementara itu, sektor industri memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi. Tingginya produktivitas sektor industri menyebabkan terjadinya pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Pengalihan tersebut mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan oleh sektor industri sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Lewis dalam Kuncoro, 2006). Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Todaro, 2006).

Pada model ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan

ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pemerataan. Hipotesis Kuznetz mengasumsikan bahwa pada tahapan awal pembangunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kemudian menurun pada tahap akhir. Selain itu, rasio produktivitas juga berdampak pada ketimpangan pendapatan. Rasio produktivitas sektor industri terhadap pertanian yang semakin besar akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin besar (Kuncoro, 2006). Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah rasio pendidikan. Semakin besar rasio pendidikan akan berdampak pada ketimpangan pendapatan yang semakin melebar (Todaro, 2006).

Ravallion (2005) menyatakan bahwa terjadi *trade-off* antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan. Strategi pengentasan kemiskinan yang tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin timpang. Pada akhirnya, strategi pengentasan kemiskinan tersebut menjadi tidak efektif.

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012

2. Diduga variabel produktivitas sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
3. Diduga variabel produktivitas sektor industri berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
4. Diduga variabel pendidikan dasar berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
5. Diduga variabel pendidikan lanjutan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
6. Diduga variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
7. Diduga variabel rasio produktivitas sektor industri dan pertanian berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
8. Diduga variabel rasio pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
9. Diduga terdapat hubungan antara variabel tingkat kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (P) dan ketimpangan pendapatan (K) di Jawa Tengah. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah laju PDRB Jawa Tengah berdasar harga konstan (G), produktivitas sektor pertanian di Jawa Tengah (VT), produktivitas sektor industri (VIN), pendidikan dasar (PDAS) dan pendidikan lanjutan (PLAN), rasio produktivitas sektor industri dan pertanian (LnRV), dan rasio pendidikan (LnRPD). Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan (P) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskian di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan persen), Data diambil dari BPS.

2. Ketimpangan Pendapatan (K) adalah besarnya angka gini rasio di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (berkisar 0-1), Data diambil dari BPS.
3. Laju PDRB (G), dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Dimana:

$G_t$  = tingkat pertumbuhan PDRB yang dinyatakan dalam persen

$Y_t$  adalah PDRB pada tahun t

$Y_{t-1}$  adalah PDRB pada tahun t-1

4. Produktivitas sektor pertanian (VT) adalah rasio antara output yang dihasilkan pada sektor pertanian dengan input tenaga kerja di sektor pertanian di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$VT = \frac{\text{output sektor pertanian}}{\text{input tenaga kerja sektor pertanian}} \times 100 \quad (3.2)$$

5. Produktivitas sektor pertanian (VIN) adalah rasio antara output yang dihasilkan pada sektor industri dengan input tenaga kerja di sektor industri di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$VIN = \frac{\text{output sektor industri}}{\text{input tenaga kerja sektor industri}} \times 100 \quad (3.3)$$

6. Pendidikan dasar (PDAS) adalah jumlah pekerja lulusan SD ke bawah dan SMP di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan jiwa), data diambil dari BPS.
7. Pendidikan lanjutan (PLAN) adalah jumlah pekerja lulusan SMA ke atas di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan jiwa), data diambil dari BPS.
8. Rasio produktivitas (RV) adalah perbandingan antara produktivitas sektor industri dengan pertanian di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$RV = \frac{\text{Produktivitas sektor industri}}{\text{Produktivitas sektor pertanian}} \quad (3.4)$$

9. Rasio Pendidikan (RPD) dinyatakan dalam rasio jumlah pekerja lulusan SD ke bawah dan SMP terhadap jumlah pekerja lulusan SMA ke atas di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$RPD = \frac{\text{jumlah pekerja lulusan SD + SMP}}{\text{jumlah pekerja SMA ke atas}} \times 100 \quad (3.5)$$

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun

waktu tahun 2008-2012 serta data kerat lintang (*cross-section data*) yang meliputi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dari lembaga-lembaga terkait, yaitu BPS Propinsi Jawa Tengah. Pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

### 3.4 Metode Analisis

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, dimana dua tujuan dianalisis dengan metode yang sama dan satu tujuan dianalisis dengan metode berbeda. Studi ini menggunakan analisis panel data (*pooled data*) dan analisis korelasi sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 7.1. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i; i = 1, 2, \dots, N \quad (3.7)$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan model persamaan dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t; t = 1, 2, \dots, N \quad (3.8)$$

Dimana N adalah banyaknya data *time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} \quad (3.9)$$

$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$  = banyaknya data panel

Menurut Hsiao dan Baltagi (dalam Prastyo, 2010), keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah:

- a) estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.
- b) dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), dan lebih efisien.
- c) studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.
- d) data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.

- e) data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Dalam analisis model data panel dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*)

Salah satu kesulitan prosedur data panel adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*Fixed Effect Model*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

2. Pendekatan efek acak (*Random Effect Model*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena

berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Menurut Judge dalam Gujarati (2009) ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan *fixed effect* atau pendekatan *random effect* dalam data panel:

1. Apabila jumlah time series (T) besar sedangkan jumlah cross-section (N) kecil, maka hasil *fixed effect* atau *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *Fixed Effect Model* (FEM)
2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil tidak secara acak maka *Fixed Effect* harus digunakan.
3. Apabila komponen error  $\varepsilon_i$  individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

### 3.4.1 Estimasi Model Dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pendidikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah, menggunakan data time-series selama 5 (lima) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2008-2012 dan data *cross-section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kombinasi atau *pooling* menghasilkan 175 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut:

*Model Kemiskinan*

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 G_{it} + \alpha_2 VT_{it} + \alpha_3 VIN_{it} + \alpha_4 PDAS_{it} + \alpha_5 PLAN_{it} + \mu_{it} \quad (3.10)$$

Dimana:

- P = tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah
- G = laju PDRB kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- VT = produktivitas tenaga kerja sektor pertanian kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- VIN = produktivitas tenaga kerja sektor industri kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- PDAS = tingkat pendidikan pekerja lulusan SD ke bawah dan SMP kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- PLAN = tingkat pendidikan pekerja lulusan SMA ke atas kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- $\alpha_0$  = intersep model kemiskinan
- $\alpha_1, \dots, \alpha_5$  = koefisien regresi model kemiskinan

- $\mu_{it}$  = komponen error di waktu (t) untuk unit *cross section* (i)  
 i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross-section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)  
 t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2008-2012)

*Model Ketimpangan Pendapatan*

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}G_{it} + \beta_2 \text{Ln}RV_{it} + \beta_3 \text{Ln}RPD_{it} + \mu_{it} \quad (3.11)$$

Dimana:

- K = gini rasio kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012  
 LnG = Logaritma natural dari laju PDRB kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012  
 LnRV = Logaritma natural dari rasio produktivitas tenaga kerja sektor industri dan pertanian kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012  
 LnRPD = Logaritma natural dari rasio pendidikan pekerja kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012  
 $\beta_0$  = intersep model ketimpangan pendapatan  
 $\beta_1, \dots, \beta_3$  = koefisien regresi model ketimpangan pendapatan  
 $\mu_{it}$  = komponen error di waktu (t) untuk unit *cross section* (i)  
 i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross-section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)  
 t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2008-2012)

Pada model ketimpangan pendapatan menggunakan persamaan Logaritma Natural (Ln) dengan model *semi-log* yang bertujuan untuk memudahkan proses estimasi. Gujarati (2009) mengungkapkan bahwa model Logaritma Natural (Ln) digunakan untuk mengukur elastisitas variabel dependen terhadap variabel

independen. Selain itu, Imam Ghozali (2005) menyatakan alasan dipilih bentuk fungsi Logaritma Natural (Ln) adalah untuk mendekatkan skala data dan untuk transformasi data apabila terjadi pelanggaran dalam asumsi klasik.

### **3.4.2 Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)***

Gujarati (2009) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *Fixed Effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error term*, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu:

- a. asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
- c. koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d. seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini, model kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah tahun 2008-2012 digunakan asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk model *Fixed Effect* adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan

perbedaan intersep. Ketika variabel dummy digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Penelitian ini menggunakan dummy wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 5 tahun periode penelitian (tahun 2008-2012) dimana pada model kemiskinan Kota Semarang sebagai wilayah acuan (*benchmark*) dan pada model ketimpangan pendapatan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai *benchmark* pada model kemiskinan adalah Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Sedangkan alasan penggunaan kabupaten Pemalang sebagai *benchmark* pada model ketimpangan pendapatan adalah Kabupaten Pemalang memiliki gini rasio kabupaten/kota terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada persamaan 3.10 dan 3.11 maka model persamaannya adalah sebagai berikut:

#### *Model Kemiskinan*

$$\begin{aligned}
 P_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 G_{it} + \alpha_2 VT_{it} + \alpha_3 VIN_{it} + \alpha_4 PDAS_{it} + \alpha_5 PLAN_{it} + \gamma_1 D_1 + \\
 & \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 + \gamma_5 D_5 + \gamma_6 D_6 + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \\
 & \gamma_{11} D_{11} + \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} + \gamma_{14} D_{14} + \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \\
 & \gamma_{19} D_{19} + \gamma_{20} D_{20} + \gamma_{21} D_{21} + \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \gamma_{25} D_{25} + \gamma_{26} D_{26} + \\
 & \gamma_{27} D_{27} + \gamma_{28} D_{28} + \gamma_{29} D_{29} + \gamma_{30} D_{30} + \gamma_{31} D_{31} + \gamma_{32} D_{32} + \gamma_{33} D_{33} + \gamma_{34} D_{34} + \\
 & \mu_{it}
 \end{aligned}
 \tag{3.12}$$

Dimana pada model Kemiskinan adalah :

- P = tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- G = laju PDRB kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- VT = produktivitas tenaga kerja sektor pertanian kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- VIN = produktivitas tenaga kerja sektor industri kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- PDAS = jumlah pekerja lulusan SD ke bawah dan SMP kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- PLAN = jumlah pekerja lulusan SMA ke atas kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012
- D<sub>1</sub> = Dummy kabupaten Cilacap
- D<sub>2</sub> = Dummy kabupaten Banyumas
- D<sub>3</sub> = Dummy kabupaten Purbalingga
- D<sub>4</sub> = Dummy kabupaten Banjarnegara
- D<sub>5</sub> = Dummy kabupaten Kebumen
- D<sub>6</sub> = Dummy kabupaten Purworejo
- D<sub>7</sub> = Dummy kabupaten Wonosobo
- D<sub>8</sub> = Dummy kabupaten Magelang
- D<sub>9</sub> = Dummy kabupaten Boyolali
- D<sub>10</sub> = Dummy kabupaten Klaten
- D<sub>11</sub> = Dummy kabupaten Sukoharjo
- D<sub>12</sub> = Dummy kabupaten Wonogiri

- $D_{13}$  = Dummy kabupaten Kaaranganyar
- $D_{14}$  = Dummy kabupaten Sragen
- $D_{15}$  = Dummy kabupaten Grobogan
- $D_{16}$  = Dummy kabupaten Blora
- $D_{17}$  = Dummy kabupaten Rembang
- $D_{18}$  = Dummy kabupaten Pati
- $D_{19}$  = Dummy kabupaten Kudus
- $D_{20}$  = Dummy kabupaten Jepara
- $D_{21}$  = Dummy kabupaten Demak
- $D_{22}$  = Dummy kabupaten Semarang
- $D_{23}$  = Dummy kabupaten Temanggung
- $D_{24}$  = Dummy kabupaten Kendal
- $D_{25}$  = Dummy kabupaten Batang
- $D_{26}$  = Dummy kabupaten Pekalongan
- $D_{27}$  = Dummy kabupaten Pemasang
- $D_{28}$  = Dummy kabupaten Tegal
- $D_{29}$  = Dummy kabupaten Brebes
- $D_{30}$  = Dummy kota Magelang
- $D_{31}$  = Dummy kota Surakarta
- $D_{32}$  = Dummy kota Salatiga
- $D_{33}$  = Dummy kota Pekalongan
- $D_{34}$  = Dummy kota Tegal
- $\alpha_0$  = intersep model kemiskinan

$\alpha_1, \dots, \alpha_5$  = koefisien regresi model kemiskinan

$\mu_{it}$  = komponen error di waktu (t) untuk unit *cross section* (i)

i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross-section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)

t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2008-2012)

#### *Model Ketimpangan Pendapatan*

$$\begin{aligned}
 K_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}G_{it} + \beta_2 \text{Ln}RV_{it} + \beta_3 \text{Ln}RPD_{it} + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 + \\
 & \gamma_5 D_5 + \gamma_6 D_6 + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \gamma_{11} D_{11} + \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} + \\
 & \gamma_{14} D_{14} + \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \gamma_{19} D_{19} + \gamma_{20} D_{20} + \gamma_{21} D_{21} + \\
 & \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \gamma_{25} D_{25} + \gamma_{26} D_{26} + \gamma_{27} D_{27} + \gamma_{28} D_{28} + \gamma_{29} D_{29} + \\
 & \gamma_{30} D_{30} + \gamma_{31} D_{31} + \gamma_{32} D_{32} + \gamma_{33} D_{33} + \gamma_{34} D_{34} + \mu_{it} \quad (3.13)
 \end{aligned}$$

Sedangkan pada model ketimpangan pendapatan adalah:

K = gini rasio kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012

LnG = Logaritma Natural dari laju PDRB kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012

LnRV = Logaritma Natural dari rasio produktivitas tenaga kerja sektor industri dan pertanian kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012

LnRPD = Logaritma Natural dari rasio pendidikan pekerja kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012

$D_1$  = Dummy kabupaten Cilacap

$D_2$  = Dummy kabupaten Banyumas

$D_3$  = Dummy kabupaten Purbalingga

- D<sub>4</sub> = Dummy kabupaten Banjarnegara
- D<sub>5</sub> = Dummy kabupaten Kebumen
- D<sub>6</sub> = Dummy kabupaten Purworejo
- D<sub>7</sub> = Dummy kabupaten Wonosobo
- D<sub>8</sub> = Dummy kabupaten Magelang
- D<sub>9</sub> = Dummy kabupaten Boyolali
- D<sub>10</sub> = Dummy kabupaten Klaten
- D<sub>11</sub> = Dummy kabupaten Sukoharjo
- D<sub>12</sub> = Dummy kabupaten Wonogiri
- D<sub>13</sub> = Dummy kabupaten Karanganyar
- D<sub>14</sub> = Dummy kabupaten Sragen
- D<sub>15</sub> = Dummy kabupaten Grobogan
- D<sub>16</sub> = Dummy kabupaten Blora
- D<sub>17</sub> = Dummy kabupaten Rembang
- D<sub>18</sub> = Dummy kabupaten Pati
- D<sub>19</sub> = Dummy kabupaten Kudus
- D<sub>20</sub> = Dummy kabupaten Jepara
- D<sub>21</sub> = Dummy kabupaten Demak
- D<sub>22</sub> = Dummy kabupaten Semarang
- D<sub>23</sub> = Dummy kabupaten Temanggung
- D<sub>24</sub> = Dummy kabupaten Kendal
- D<sub>25</sub> = Dummy kabupaten Batang
- D<sub>26</sub> = Dummy kabupaten Pekalongan

- $D_{27}$  = Dummy kabupaten Tegal  
 $D_{28}$  = Dummy kabupaten Brebes  
 $D_{29}$  = Dummy kota Magelang  
 $D_{30}$  = Dummy kota Surakarta  
 $D_{31}$  = Dummy kota Salatiga  
 $D_{32}$  = Dummy kota Semarang  
 $D_{33}$  = Dummy kota Pekalongan  
 $D_{34}$  = Dummy kota Tegal  
 $\beta_0$  = intersep model ketimpangan pendapatan  
 $\beta_1, \dots, \beta_3$  = koefisien regresi model ketimpangan pendapatan  
 $\mu_{it}$  = komponen error di waktu (t) untuk unit *cross section* (i)  
i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross-section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)  
t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2008-2012)

### 3.4.3 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

### a. Deteksi Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ini akan menggunakan *auxiliary regressions* dan *Klien's rule of thumb* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih besar dari  $R^2$  *auxiliary regressions* maka di dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

### b. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Masalah autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

$$H_0: \rho = 0$$

$$H_1: \rho \neq 0$$

Kriteria uji:

$Obs * R\text{-Square} < \text{nilai } \chi^2 \text{ tabel}$ , maka terima  $H_0$

$Obs * R\text{-Square} > \text{nilai } \chi^2 \text{ tabel}$ , maka tolak  $H_0$

Apabila nilai *Obs\*R-squared*-nya lebih kecil dari taraf nyata tertentu (terima  $H_0$ ) maka persamaan tersebut tidak mengandung unsur autokorelasi. Gujarati (2009) menyatakan bahwa walaupun nilai koefisien *Durbin-Watson* tidak berubah

akan tetapi penyesuaian terhadap autokorelasi telah dilakukan dan persamaan dianggap telah bebas dari masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas.

### c. Deteksi Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Imam Ghozali, 2005). Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan *Uji White*. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat ( $u_t^2$ ) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai  $R^2$ , untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Kriteria yang digunakan adalah apabila  $\chi^2$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai *Obs\*R-squared*, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

### d. Deteksi Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Imam Ghozali, 2005). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera (J-B) Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode *J-B Test*, apabila *J-B* hitung < nilai  $\chi^2$  (Chi-Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.

### 3.4.4 Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya ( $R^2$ ), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (uji t).

#### 3.4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

Nilai  $R^2$  yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana  $0 < R^2 < 1$  sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
2. Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

#### 3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen, dengan rumus (Gujarati, 2010):

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)} \quad (3.14)$$

Dimana :

$R^2$  : koefisien determinasi

$k$  : jumlah variabel independen

$N$  : jumlah sampel

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0$  (ada pengaruh)

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F tabel menggunakan kriteria sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
2.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

#### 3.4.4.3 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel *independent* secara individu berpengaruh

terhadap variabel *dependent*. Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_i = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_1 : b_i \neq 0$  (ada pengaruh)

$$T_{hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)} \quad (3.15)$$

Dimana:

$Se(b_i)$  = Standar error dari  $b$

$b_i$  = Koefisien regresi

Kesimpulan:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka tolak  $H_0$  terima  $H_1$ , artinya  $X_i$  (variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap  $Y$  (variabel *dependent*/ variabel tidak bebas).
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka terima  $H_0$  tolak  $H_1$ , artinya  $X_i$  (variabel-variabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh nyata terhadap  $Y$  (variabel tidak bebas).

### 3.4.5 Matriks Korelasi

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan digunakan matriks korelasi. Hasil perhitungan korelasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

- a. Korelasi positif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati 1. Ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai pada variabel yang satu akan diikuti dengan kenaikan nilai variabel lainnya.

- b. Korelasi negatif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati atau sama dengan -1. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai pada variabel yang satu akan diikuti dengan penurunan nilai variabel lainnya. Sebaliknya, apabila nilai variabel yang satu turun, maka nilai variabel yang lain akan naik.
- c. Tidak ada korelasi, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati atau sama dengan 0 (nol). Hal ini berarti bahwa naik turunnya nilai satu variabel tidak mempunyai kaitan dengan naik turunnya variabel yang lain.

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Sarwono (dalam Franciari, 2012) memberikan kriteria kekuatan hubungan antara dua variabel sebagai berikut:

- a. 0 : tidak ada korelasi antara dua variabel
- b.  $|0 \leq R^2 \leq 0,25|$  : korelasi sangat lemah
- c.  $|0,25 \leq R^2 \leq 0,5|$  : korelasi cukup kuat
- d.  $|0,5 \leq R^2 \leq 0,75|$  : korelasi kuat
- e.  $|0,75 \leq R^2 \leq 0,99|$  : korelasi sangat kuat
- f. 1 : korelasi sempurna